



RENCANA KERJA (RENWA)

TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH SATPOL-PP & LINMAS

Jln. Baloho Indah - Teluk Dalam

Kel. Pasar Teluk Dalam. Kec. Teluk Dalam, Kode Pos. 22865





PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jalan Baloho Indah Nomor - Nias Selatan (22865) Sumatera Utara
TELUK DALAM



Teluk Dalam, 15 Mei 2024

Nomor : 300.1/ 224 /SATPOLPP-LINMAS/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Penyampaian Rancangan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2025**

Yth. **Bapak Bupati Nias Selatan**

C/q. Kepala Bappeda
Kab. Nias Selatan

di

Teluk Dalam

Memenuhi Surat Bapak Sekretaris Daerah Kab. Nias Selatan Nomor : 000.7.2.4/13207/01/V/2024 tanggal 03 Mei 2024, tentang Penyampaian Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan ini disampaikan data dimaksud dari Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan sebagai bahan.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN NIAS SELATAN,

DIONISIUS WAU, SE.,MM
PEMBINA
NIP. 19800724 200804 1 001

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan Pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 07 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang Tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan sebagai OPD pada Tahun Anggaran 2024 ini menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025.

Renja OPD merupakan Dokumen Rencana Pembangunan OPD yang berjangka waktu 01 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025, akan dijadikan sebagai Pedoman dan Rujukan dalam menyusun Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 yang mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan, dimana dalam penyusunannya juga memperhatikan Program dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-undangan yang melatar belakangi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Nias Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_58 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Dearah Kabupaten Nias Selatan;

16. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026;
17. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025;
18. Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Penyusun RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang sangat penting, menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk mendukung pencapaian visi misi Daerah. Secara makro maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja ini adalah sebagai berikut :

- Maksud : Memberikan arahan dan pedoman terhadap pelaksanaan pembangunan daerah dalam waktu satu tahun yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas.
- Tujuan :
 1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025;
 2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor,dan antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
 3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
 4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN :

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang :

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum :

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan :

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan :

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah :

Bab ini memuat kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun tahun sebelumnya. Review

hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan / atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah :

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika perangkat daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah :

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD :

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan ;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD , misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat :

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi/asosiasi, perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah kabupaten/ kota yang

langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/ kota (bila sudah disahkan).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional :

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah :

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan :

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Perangkat Daerah, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kondisi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB V PENUTUP :

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan.
- b. Kaidah kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB. II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Renja OPD Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan Tahun Anggaran 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas yang akan dilaksanakan;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya Penyusunan Renja OPD Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan Tahun Anggaran 2025 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025 ;
 2. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Realisasi fisik/kinerja OPD Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan untuk Tahun Anggaran 2023 s/d tahun berjalan untuk masing-masing program adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

OPD Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan

KODE	URUSAN/ BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2022-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	SATUAN TARGET KINERJA	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2023)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN	
							TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI RENJA OPD TAHUN 2023(%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN	TINGKAT REALISASI RENJA OPD TAHUN 2024 (%)
1	2	3		4	5		6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat Tekhnis		100%	16,67%	Persen	20%	16,67%	83,35%	20%	53,34%	53,34%
1.05.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100%	99,84%	Persen	100%	99,84%	99,84%	100%	99,89%	99,89%
1.05.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaporkan	65	13	Dokumen/ Laporan	13	13	100%	13	39	60%
1.05.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10	2	Dokumen	2	2	100%	2	6	60%
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	5	1	Dokumen	1	1	100%	1	3	60%
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	5	1	Dokumen	1	1	100%	1	3	60%
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi	5	1	Dokumen	1	1	100%	1	3	60%

		penyusunan dokumen DPA-SKPD	penyusunan dokumen DPA-SKPD									
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	5	1	Dokumen	1	1	100%	1	3	60%
1.05.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	35	7	Laporan	7	7	100%	7	21	60%
1.05.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai dan Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaporkan	198	36	Laporan	36	36	100%	36	108	54,55%
1.05.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	103	17	Orang/ Bulan	17	17	100%	17	51	49,51%
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	1	Laporan	1	1	100%	1	3	60%
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran skpd	Tersedianya laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	90	18	Laporan	18	18	100%	18	54	60%
1.05.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai dan Dokumen Adminitrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	1500	300	Orang/Paket	300	300	100%	300	900	60,00%
1.05.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan	750	150	Paket	150	150	100%	150	450	60,00%
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	750	150	Orang	150	150	100%	150	450	60,00%
1.05.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Kegiatan dan Dokumen Administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	690	136	Laporan/ Paket	136	136	100%	134	406	58,84%
1.05.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Tersedianya komponen listrik/penerangan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan	5	1	Paket	1	1	100%	1	3	60%

	bangunan kantor	bangunan kantor	bangunan kantor yang disediakan									
1.05.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	1	Paket	1	1	0%	1	3	60%
1.05.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5	0	Paket	0	0	0%	0	0	0%
1.05.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5	1	Paket	1	1	100%	1	3	60%
1.05.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5	1	Paket	1	1	100%	1	3	60%
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	665	132	Laporan	132	132	100%	130	394	59,25%
1.05.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	68	2	Unit	3	2	67%	1	5	7,35%
1.05.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	15	2	Unit	3	2	67%	1	5	33,33%
1.05.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Tersedianya mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	3	0	Unit	0	0	0%	0	0	0%
1.05.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	50	0	Unit	0	0	0%	0	0	0%

1.05.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai dan Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	680	125	Laporan	125	125	100%	125	375	55,15%
1.05.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	5	0	Laporan	0	0	0%	0	0	0%
1.05.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	675	125	Laporan	125	125	100%	125	375	56%
1.05.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	82	10	Unit	10	10	100%	10	30	36,59%
1.05.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	37	3	Unit	3	3	100%	3	9	24,32%
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40	6	Unit	6	6	100%	6	18	45%

1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	5	1	Unit	1	1	100%	1	3	60%
		Persentase Perda dan Perkada yang disosialisasikan		100%	20%		20%	20%	100%	20%	30%	30%
1.05.02	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	Persen	100%	99,62%	99,62%	100%	99,75%	99,75%
1.05.02.2.01	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Tertanganinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	974	205	Laporan	206	205	100%	207	617	63,35%
1.05.02.2.01.01	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Terlaksananya Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	375	85	Kasus	85	85	100%	85	255	68,00%

1.05.02.2.01.02	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Terlaksanya penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	300	85	Kasus	85	85	100%	85	255	85,00%
1.05.02.2.01.03	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	175	34	Dokumen	34	34	100%	35	103	58,86%
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Tersedianya dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	1	0	Dokumen	0	0	0%	1	1	100%

1.05.02.2.01.05	Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Jumlah SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	25	0	Orang	0	0	0%	0	0	0%
1.05.02.2.01.06	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	60	0	Dokumen	0	0	0%	0	0	0%
1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Tersedianya sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	3	0	Unit	0	0	0%	0	0	0%
1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Tersedianya Dokumen SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	10	1	Dokumen	2	1	50%	1	3	30%
1.05.02.2.01.09	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan perkara	Tersedianya laporan penyediaan pelayanan dalam rangka penyelesaian dampak penegakan perda dan perkara	Jumlah laporan layanan dampak penegakan perda dan perkara yang terlayani	25	0	Laporan	0	0	0%	0	0	0%

1.05.02.2.02	Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota	Terlaksananya Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota yang dilaporkan	525	55	Laporan	55	55	100%	80	190	36,19%
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Terlaksananya sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	175	0	Laporan	0	0	0%	25	25	14%
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Terlaksananya Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	175	35	Laporan	35	35	100%	35	105	60,00%
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Terlaksananya Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota sesuai SOP	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota sesuai SOP	175	20	Laporan	20	20	100%	20	60	34,29%
1.05.02.2.03	Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (ppns) kabupaten/kota	Terlaksananya pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kabupaten/kota	Jumlah Aparatur Satpol-PP yang mengikuti Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (ppns)	5	1	Laporan	1	1	0%	1	3	60%

1.05.02.2.03.01	Pengembangan kapasitas dan karier ppns	Terlaksananya pengembangan kapasitas dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan perda	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan perda	5	1	Laporan	1	1	0%	1	3	60%
1.05.04	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100%	18,72%	Persen	20%	18,72%	93,62%	20%	28,72%	28,72%
1.05.04.2.01	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota yang dilaporkan	416	44	Laporan	47	44	94%	50	138	33,17%
1.05.04.2.01.01	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	175	40	Dokumen	40	40	100%	35	115	66%

1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemadaman dan pengendalian bahaya kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	75	4	Laporan	7	4	57%	12	20	26,67%
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah laporan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	75	0	Dokumen	0	0	0%	0	0	0%
1.05.04.2.01.04	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	75	0	Dokumen	0	0	0%	0	0	0%
1.05.04.2.01.06	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta alat pelindung diri sesuai standar teknis terkait	2	0	Unit	0	0	0%	1	1	50%
1.05.04.2.01.07	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah laporan hasil pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten/kota	9	0	Orang	0	0	0%	2	2	22%
1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	5	0	Dokumen	0	0	0%	0	0	0%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai tindak lanjut dari Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, maka Standar Pelayanan Minimal Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan diukur dengan indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan), mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota maka standar pelayanan minimal Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan diukur dengan 2 indikator yaitu :

- a. Persentase ASN yang mengikuti Diklat Tekhnis;
- b. Persentase Perda dan Perkada yang disosialisasikan;

Ada beberapa kendala yang masih dihadapi dalam meningkatkan kinerja Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan diatas dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Faktor Internal

- a. Masih kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan OPD Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan;
- b. Masih kurangnya Petunjuk Teknis dan Operasional atas Perda yang diampu oleh Instansi terkait;
- c. Sarana dan prasarana pendukung yang kurang komprehensif yaitu alat-alat pendukung operasi-operasi di lapangan yang masih kurang memadai;
- d. Minimnya skill tentang manajemen konflik para personil Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Nias Selatan, sehingga perlu adanya pelatihan pelatihan/diklat (Diklat sar Pola 150 Jam) untuk menunjang profesionalitas dalam menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi.

2. Faktor Eksternal

- a. Tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Nias Selatan yang relatif tinggi, yang berimbas pada meningkatnya kebutuhan akan pemenuhan ekonomi lewat kerja dan usaha. Seiring dengan hal tersebut ternyata sektor formal tidak mampu menyerap seluruh tenaga kerja yang ada. Akibatnya terjadi kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung pada sektor formal, mempercepat tumbuhnya sektor informal. Salah satu bentuk perdagangan informal yang penting adalah pedagang kaki lima (PKL);
- b. Posisi Kabupaten Nias Selatan yang strategis menarik bagi para pelaku usaha dari daerah lain, terutama pelaku usaha sektor informal namun tidak diimbangi dengan pemahaman terhadap perda dan trantib yang berlaku di Kabupaten Nias Selatan, sehingga sering terjadi pelanggaran;
- c. Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penegakan perda dan trantib yang masih kurang;

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan melalui IKK Kabupaten Nias Selatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi.

Tabel T.C-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Satpol-PP dan Linmas Kabupaten Nias Selatan

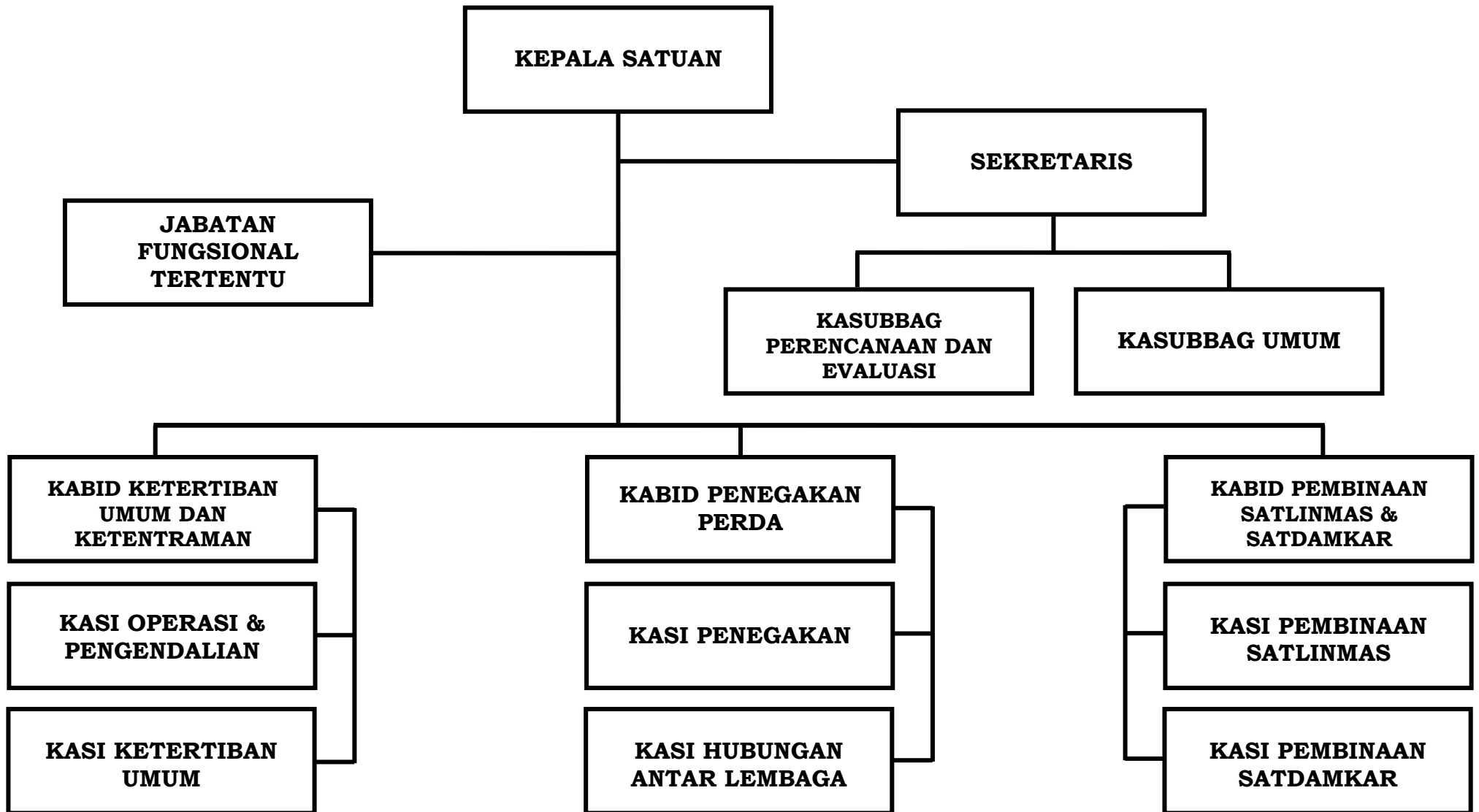
No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Kondisi Akhir Tahun 2026	Target Renstra					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Tekhnis	-	100%	0%	20%	20%	20%	20%	0%	16,67%	16,67%	20%	20%	
2	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	-	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	95,88%	99,84%	100%	100%	
3	Persentase Perda dan Perkada yang disosialisasikan	-	100%	0%	20%	20%	20%	20%	0%	20%	20%	20%	20%	
4	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	-	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	90,27%	99,62%	100%	100%	
5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	-	100%	0%	20%	20%	20%	20%	0%	18,75%	18,72%	20%	20%	

Selanjutnya dapat kami tampilkan Indikator Kinerja Utama Pelayanan Perangkat Daerah Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan dalam mendukung Sasaran RPJMD Kab. Nias Selatan 2021-2026, sebagaimana tabel berikut :

Indikator Kinerja Utama Satpol-PP dan Linmas
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama OPD	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Tekhnis	Persen	0%	20%	20%	20%	20%	20%	100%
2	Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Persentase Perda dan Perkada yang disosialisasikan	Persen	0%	20%	20%	20%	20%	20%	100%

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN NIAS SELATAN**



2.2.1 SUMBER DAYAMANUSIA

Kondisi Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan menurut kualifikasi golongan/ pangkat dapat kami sajikan sebagaimana tabel berikut :

**Kondisi Sumber Daya Manusia
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Nias Selatan
Menurut Kualifikasi Golongan/Pangkat**

Keadaan : Bulan Januari 2024

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	I (SATU)	0 APARAT
2	II (DUA)	2 APARAT
3	III (TIGA)	14 APARAT
4	IV (EMPAT)	1 APARAT
5	NON PNS	125 APARAT
TOTAL		142 APARAT

2.2.2 SARANA DAN PRASARANA

Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat kami sajikan sebagaimana tabel berikut :

**Kondisi Sarana dan Prasarana
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Nias Selatan
Menurut Data Barang Milik Daerah**

Keadaan : Bulan Januari 2024

No.	Regis	Nama Barang	Kondisi
1	0001	Mobil Damkar	Rusak Berat
2	0002	Mobil Damkar	Rusak Berat
3	0067	Sepeda Motor	Rusak Berat
4	0135	Sepeda Motor	Rusak Berat
5	0437	Sepeda Motor	Rusak Berat
6	0438	Sepeda Motor	Rusak Berat
7	0439	Mobil Dalmas Pol-PP	Baik
8	0444	Mobil Damkar	Baik
9	0445	Mobil Patwal Pol-PP	Baik
10	0446	Sepeda Motor	Baik
11	0447	Sepeda Motor	Baik
12	0270	Lemari Arsip	Baik
13	0271	Lemari Arsip	Baik
14	0272	Lemari Arsip	Baik
15	0277	Kursi Kerja Sandaran Tinggi	Baik
16	0280	Kursi Kerja Sandaran Punggung	Baik
17	0281	Kursi Kerja Sandaran Punggung	Baik
18	0282	Kursi Kerja Sandaran Punggung	Baik

19	0283	Kursi Kerja Sandaran Punggung	Rusak Berat
20	0284	Kursi Kerja Sandaran Punggung	Baik
21	0285	Kursi Kerja Sandaran Punggung	Baik
22	0286	Kursi Kerja Sandaran Punggung	Baik
23	0287	Kursi Kerja Sandaran Punggung	Rusak Berat
24	0288	Kursi Kerja Sandaran Punggung	Rusak Berat
25	0289	Meja Biro	Baik
26	0290	Meja 1/2 Biro	Baik
27	0291	Meja 1/2 Biro	Baik
28	0292	Meja 1/2 Biro	Baik
29	0293	Meja 1/2 Biro	Baik
30	0294	Meja 1/2 Biro	Baik
31	0295	Meja 1/2 Biro	Baik
32	0296	Meja 1/2 Biro	Baik
33	0297	Meja 1/2 Biro	Baik
34	0298	Kursi Sofa	Baik
35	0299	Brankas	Baik
36	0396	Selang Jet Star	Baik
37	0397	Selang Jet Star	Baik
38	0398	Pemadam Kebakaran	Baik
39	0399	Pemadam Kebakaran	Baik
40	0400	Pemadam Kebakaran	Baik
41	0401	Pemadam Kebakaran	Baik
42	0402	Pemadam Kebakaran	Baik
43	0403	Pemadam Kebakaran	Baik
44	0404	Pemadam Kebakaran	Baik
45	0405	Pemadam Kebakaran	Baik
46	0406	Pemadam Kebakaran	Baik
47	0407	Pemadam Kebakaran	Baik
48	0408	Pemadam Kebakaran	Baik
49	0409	Pemadam Kebakaran	Baik
50	0410	Pemadam Kebakaran	Baik
51	0411	Pemadam Kebakaran	Baik
52	0412	Pemadam Kebakaran	Baik
53	0413	Pemadam Kebakaran	Baik
54	0414	Pemadam Kebakaran	Baik
55	0415	Pemadam Kebakaran	Baik
56	0416	Pemadam Kebakaran	Baik
57	0417	Pemadam Kebakaran	Baik
58	0440	Televisi + Paket Parabola	Rusak Ringan
59	0001	A.C. Split	Baik
60	0002	A.C. Split	Baik
61	0001	Sound System	Baik
62	0443	Lap Top	Baik
63	0444	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik
64	0001	Lemari Kayu	Baik
65	0002	Lemari Kayu	Baik
66	0003	Lemari Kayu	Baik
67	0004	Lemari Kayu	Baik
68	0005	Lemari Kayu	Baik
69	0418	Kamera Digital	Baik

70	0419	Handy Talky	Rusak Berat
71	0420	Handy Talky	Rusak Berat
72	0421	Handy Talky	Rusak Berat
73	0422	Handy Talky	Rusak Berat
74	0423	Handy Talky	Rusak Berat
75	0424	Handy Talky	Rusak Berat
76	0425	Handy Talky	Baik
77	0426	Handy Talky	Baik
78	0427	Handy Talky	Baik
79	0428	Handy Talky	Baik
80	0429	Handy Talky	Baik
81	0430	Handy Talky	Baik
82	0430	Handy Talky	Baik
83	0430	Handy Talky	Baik
84	0431	Handy Talky	Baik
85	0230	Komputer PC	Baik
86	0231	Komputer PC	Rusak Berat
87	0232	Laptop	Rusak Berat
88	0233	Laptop	Baik
89	0273	Printer	Rusak Berat
90	0274	Printer	Rusak Berat
91	0275	Printer Dwi Fungsi	Rusak Berat
92	0276	Komputer PC	Baik
93	0441	Komputer PC	Baik
94	0442	Laptop	Rusak Berat
95	0443	Printer All in One	Baik
96	0432	Baju Tahan Api	Baik
97	0433	Baju Tahan Api	Baik
98	0434	Baju Tahan Api	Baik
99	0435	Baju Tahan Api	Baik
100	0436	Baju Tahan Api	Baik

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam perumusan isu-isu penting dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan, konteks perumusan isu strategis Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan akan meliputi beberapa runtutan kegiatan diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaah RPJMD Pemkab Nias Selatan, telaah terhadap dokumen Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sampai dengan tujuan akhir didalam konteks laporan adalah melakukan Penentuan isu-isu

Strategis Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan.

2.3.2 Secara umum beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan dalam pelaksanaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum antara lain :

- a. Standar SDM masih banyak yang belum memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang masih sangat terbatas;
- c. Jumlah personil yang belum memadai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Sarana dan prasarana yang kurang memadai;
- e. Masih rendahnya ketaatan sebagian masyarakat dalam melaksanakan Peraturan Daerah;
- f. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. Regulasi yang tidak mendukung dalam proses penegakkan Peraturan Daerah;
- h. Sikap dan perilaku sebagian masyarakat yang cenderung ingin bebas tanpa batas sehingga mengabaikan aturan.

Sedangkan secara khususnya Permasalahan yang akan dihadapi oleh Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan dalam pelaksanaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk Tahun Anggaran 2024 antaralain :

- a. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan Pengamanan Pilpres, Pemilu Legislatif dan Pilkada.
- b. Jumlah Personil Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan yang masih minim untuk melaksanakan Pengamanan Pilpres, Pemilu Legislatif dan Pilkada.
- c. Jumlah Personil Satlinmas Desa/Kecamatan yang belum terlatih dan teroganisir.
- d. Minimnya Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Pengamanan Pilpres, Pemilu Legislatif dan Pilkada.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Program dan kegiatan yang direncanakan dalam dokumen Renja Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rancangan Renstra Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan Tahun 2021-2026 yang menjadi bahan penyusunan Rancangan Renja Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan.

Secara ringkas review terhadap Rancangan Renja RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL : T-C. 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
OPD SATPOL-PP DAN LINMAS KAB. NIAS SELATAN

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2025								CATAT AN PENTIN G
NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKAS I	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKAS I	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA	
		Kab. Nias Selatan	Nilai Lakip	Nilai/ Predikat	B				Kab. Nias Selatan	Nilai Lakip	Nilai/ Predikat	B		
		Kab. Nias Selatan	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Tekhnis	Persen	20				Kab. Nias Selatan	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Tekhnis	Persen	20		
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kab. Nias Selatan	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	2.143.837.500	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kab. Nias Selatan	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	3.848.500.000	
1.1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaporkan	Dok/La P	13	18.000.000	1.1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaporkan	Dok/La P	13	39.500.000	
1.1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dok	2	3.000.000	1.1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dok	2	6.500.000	
1.1.2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dok	1	3.000.000	1.1.2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dok	1	6.500.000	
1.1.3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dok	1	3.000.000	1.1.3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dok	1	6.500.000	
1.1.4	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dok	1	3.000.000	1.1.4	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dok	1	6.500.000	
1.1.5	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Dok	1	3.000.000	1.1.5	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Dok	1	6.500.000	

1.1.6	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Lap	7	3.000.000	1.1.6	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Lap	7	7.000.000	
1.2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah Pegawai dan Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaporkan	Laporan	39	136.000.000	1.2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah Pegawai dan Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaporkan	Laporan	39	263.500.000	
1.2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	Kab. Nias Selatan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Org/ Bln	20	130.000.000	1.2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	Kab. Nias Selatan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Org/ Bln	20	250.000.000	
1.2.2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Lap	1	3.000.000	1.2.2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Lap	1	6.500.000	
1.2.3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran skpd	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Lap	18	3.000.000	1.2.3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran skpd	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Lap	18	7.000.000	
1.3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah Pegawai dan Dokumen Adminitrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	Orang	300	170.000.000	1.3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah Pegawai dan Dokumen Adminitrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	Orang	300	300.000.000	
1.3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Nias Selatan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan	Paket	150	100.000.000	1.3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Nias Selatan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan	Paket	150	150.000.000	
1.3.2	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Nias Selatan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	150	70.000.000	1.3.2	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Nias Selatan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	150	150.000.000	
1.4	Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kegiatan dan Dokumen Administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Lap/ Paket	154	337.710.000	1.4	Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kegiatan dan Dokumen Administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Lap/ Paket	154	931.500.000	
1.4.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	3.000.000	1.4.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.500.000	
1.4.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	50.000.000	1.4.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	150.000.000	
1.4.3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Nias Selatan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0	-	1.4.3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Nias Selatan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0	-	
1.4.4	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	169.710.000	1.4.4	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	250.000.000	
1.4.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Nias Selatan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	15.000.000	1.4.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Nias Selatan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	25.000.000	
1.4.6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Lap	150	100.000.000	1.4.6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Lap	150	500.000.000	

			SKPD							SKPD				
1.5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Unit	2	70.000.000	1.5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Unit	2	75.000.000	
1.5.1	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Nias Selatan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	2	70.000.000	1.5.1	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Nias Selatan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	2	75.000.000	
1.5.2	Pengadaan mebel	Kab. Nias Selatan	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	0	-	1.5.2	Pengadaan mebel	Kab. Nias Selatan	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	0	-	
1.5.3	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0	-	1.5.3	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0	-	
1.6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah Pegawai dan Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Lap	125	1.281.837.500	1.6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah Pegawai dan Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Lap	125	2.100.000.000	
1.6.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Lap	0	-	1.6.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Lap	0	-	
1.6.2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Lap	125	1.281.837.500	1.6.2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Lap	125	2.100.000.000	
1.7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintahan daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	Unit	12	130.290.000	1.7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	Unit	12	139.000.000	
1.7.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Nias Selatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	110.290.000	1.7.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Nias Selatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	3	115.000.000	
1.7.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	8	5.000.000	1.7.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	8	9.000.000	
1.7.3	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	1.7.3	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	
		Kab. Nias Selatan	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100				Kab. Nias Selatan	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100		
		Kab. Nias Selatan	Persentase Perda dan Perkada yang disosialisasikan	Persen	20				Kab. Nias Selatan	Persentase Perda dan Perkada yang disosialisasikan	Persen	20		
2	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Kab. Nias Selatan	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	353.000.000	2	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Kab. Nias Selatan	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	858.721.000	

2.1	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	Laporan	35 2	250.000.000	2.1	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	Laporan	35 1	618.721.000	
2.1.1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kab. Nias Selatan	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Kasus	15 0	50.000.000	2.1.1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kab. Nias Selatan	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Kasus	15 0	215.000.000	
2.1.2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kab. Nias Selatan	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	Kasus	15 0	30.000.000	2.1.2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kab. Nias Selatan	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	Kasus	15 0	215.000.000	
2.1.3	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Dok	50	50.000.000	2.1.3	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Dok	50	90.000.000	
2.1.4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dok	1	30.000.000	2.1.4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dok	0	-	
2.1.5	Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Kab. Nias Selatan	Jumlah SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	0	-	2.1.5	Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Kab. Nias Selatan	Jumlah SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	0	-	
2.1.6	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Dok	0	-	2.1.6	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Dok	0	-	
2.1.7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Nias Selatan	Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	Unit	0	-	2.1.7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Nias Selatan	Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	Unit	0	-	

2.1.8	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	Dok	1	90.000.000	2.1.8	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	Dok	1	98.721.000	
2.1.9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan perkara	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan layanan dampak penegakan perda dan perkara yang terlayani	Lap	0	-	2.1.9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan perkara	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan layanan dampak penegakan perda dan perkara yang terlayani	Lap	0	-	
2.2	Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota yang dilaporkan	Laporan	51	78.000.000	2.2	Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota yang dilaporkan	Laporan	100	190.000.000	
2.2.1	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Lap	1	28.000.000	2.2.1	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Lap	25	50.000.000	
2.2.2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Lap	50	50.000.000	2.2.2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Lap	50	90.000.000	
2.2.3	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota sesuai SOP	Lap	0	-	2.2.3	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota sesuai SOP	Lap	25	50.000.000	
2.3	Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (ppns) kabupaten/kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Aparatur Satpol-PP yang mengikuti Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (ppns)	Lap	1	25.000.000	2.3	Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (ppns) kabupaten/kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Aparatur Satpol-PP yang mengikuti Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (ppns)	Lap	2	50.000.000	
2.3.1	Pengembangan kapasitas dan karier ppns	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan perda	Lap	1	25.000.000	2.3.1	Pengembangan kapasitas dan karier ppns	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan perda	Lap	2	50.000.000	
3	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan kebakaran non	Kab. Nias Selatan	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	20	65.000.000	3	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan kebakaran non	Kab. Nias Selatan	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	20	135.000.000	
3.1	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, dan penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota yang dilaporkan	Laporan	61	65.000.000	3.1	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, dan penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota yang dilaporkan	Laporan	68	135.000.000	

3.1.1	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen NPSM Pencegahan/Penanggulangan an Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota setiap tahunnya	Dok	50	50.000.000	3.1.1	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen NPSM Pencegahan/Penanggulang an Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota setiap tahunnya	Dok	50	90.000.000	
3.1.2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	Lap	10	10.000.000	3.1.2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	Lap	15	30.000.000	
3.1.3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan/ Evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	Dok	0	-	3.1.3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan/ Evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	Dok	0	-	
3.1.4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan penanganan kebakaran yang disebabkan B3 dalam daerah kabupaten/kota	Dok	0	-	3.1.4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan penanganan kebakaran yang disebabkan B3 dalam daerah kabupaten/kota	Dok	0	-	
3.1.5	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Kab. Nias Selatan	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	Unit	0	-	3.1.5	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Kab. Nias Selatan	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	Unit	0	-	
3.1.6	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Kab. Nias Selatan	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Orang	1	5.000.000	3.1.6	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Kab. Nias Selatan	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Orang	3	15.000.000	
3.1.7	Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar wilayah kabupaten/ kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Dok	0	-	3.1.7	Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar wilayah kabupaten/ kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Dok	0	-	
						2.561.837.500							4.842.221.000	

2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usul Program dan Kegiatan masyarakat pada hakikatnya segala pembangunan infrastruktur dan Peningkatan SDM yang diprogramkan dimana merupakan kebutuhan masyarakat yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah, tetapi pada Realitanya Usulan/ Program tersebut kerap kali tidak terealisasi akibat berbagai alasan penting antara lain :

1. Ketersediaan Anggaran,
2. Kebijakan Prioritas Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan SDM yang sifatnya Strategis,
3. Dukungan masyarakat terutama dalam penyediaan lahan lokasi infrastruktur yang akan dilaksanakan.

Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 melakukan kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat , LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah terkait berdasarkan pelaksanaan Musrengbang Kecamatan, Kabupaten/Kota maupun berdasarkan Penelitian serta Pengamatan Pelaksanaan Pembangunan di Wilayah Kabupaten Nias Selatan.

Usul Program dan Kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan kebutuhan dan isu-isu penting dimasyarakat, sebagaimana hasil Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten/Kota yang telah diselenggarakan, sehingga dapat kami sajikan sebagai berikut :

Tabel T.C-32 :
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Nias Selatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

BAB. III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan merupakan bagian dari pada Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan secara nasional dibawah Kementrian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan dari pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian Perangkat Daerah dalam Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Merujuk dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Kementerian dan Lembaga, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan dituntut untuk turut berperan dalam pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang tertuang pada Misi ke-Tujuh sebagaimana berikut :

Visi Pemerintahan Republik Indonesia 2020-2024 :

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
berlandaskan Gotong Royong”**

Misi Pemerintahan Republik Indonesia 2020-2024:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintahdaerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sasaran jangka menengah nasional untuk urusan Satuan Polisi Pamong Praja adalah pada Misi ke-Tujuh, yaitu **“Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga”**.

Berdasarkan telaahan dari Renstra K/L maupun dari Renstra Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan, maka terdapat keterkaitan antara Isu strategis dari Satpol-PP pusat maupun provinsi dengan tugas pokok dan fungsi Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan, yaitu :

1. Perumusan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
4. Pelaksanaan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas;
6. dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dihubungkan dengan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan diharuskan untuk melaksanakan Pelayanan Dasar yang meliputi :

- a. Standar operasional prosedur Satpol-PP;
- b. Standar sarana prasarana Satpol-PP;
- c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol-PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, yaitu :

1. Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik;
2. Terwujudnya rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat Nias Selatan;

Untuk memastikan pencapaian tujuan diatas serta untuk menjaga kualitas maka ditetapkan sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan;
2. Meningkatnya rasa aman dan nyaman;

Tujuan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TA. 2025

Rencana Kerja (Renja) Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan Tahun 2025 memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan Tahun 2021-2026 dan RKPD 2025, sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan diarahkan untuk mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Satpol-PP dan Linmas Kab. Nias Selatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025, dapat kami tampilkan sebagaimana berikut :

TABEL : T-C.33

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN NIAS SELATAN**

OPD : SATPOL-PP DAN LINMAS KAB. NIAS SELATAN

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2025			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA	
		Nilai Lakip	Kab. Nias Selatan	Nilai/ Predikat	B		Nilai/ Predikat	B	
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat Tekhnis	Kab. Nias Selatan	Persen	20		Persen	20	
1.05.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Kab. Nias Selatan	Persen	100	3.848.500.000	Persen	100	4.073.500.000
1.05.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaporkan	Kab. Nias Selatan	Dok/Lap	13	39.500.000	Dok/Lap	13	39.500.000
1.05.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Nias Selatan	Dok	2	6.500.000	Dok	2	6.500.000
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Dok	1	6.500.000	Dok	1	6.500.000
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Dok	1	6.500.000	Dok	1	6.500.000
1.05.01.2.0	Koordinasi dan	Jumlah dokumen	Kab.	Dok	1		Dok	1	

1.04	penyusunan DPA-SKPD	DPA-SKPD dan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Nias Selatana			6.500.000				6.500.000
1.05.01.2.0 1.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen dan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Kab. Nias Selatana	Dok	1	6.500.000		Dok	1	6.500.000
1.05.01.2.0 1.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Nias Selatana	Lap	7	7.000.000		Lap	7	7.000.000
1.05.01.2.0 2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Pegawai dan Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaporkan	Kab. Nias Selatana	Laporan	39	263.500.000		Laporan	39	263.500.000
1.05.01.2.0 2.01	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Nias Selatana	Org/Bln	20	250.000.000		Org/Bln	20	250.000.000
1.05.01.2.0 2.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Nias Selatana	Lap	1	6.500.000		Lap	1	6.500.000
1.05.01.2.0 2.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kab. Nias Selatana	Lap	18	7.000.000		Lap	18	7.000.000
1.05.01.2.0 5	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai dan Dokumen Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	Kab. Nias Selatana	Orang	300	300.000.000		Orang	300	300.000.000
1.05.01.2.0 5.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan	Kab. Nias Selatana	Paket	150	150.000.000		Paket	150	150.000.000
1.05.01.2.0 5.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Nias Selatana	Orang	150	150.000.000		Orang	150	150.000.000
1.05.01.2.0 6	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Kegiatan dan Dokumen Administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Kab. Nias Selatana	Lap/Paket	154	931.500.000		Lap/Paket	154	931.500.000
1.05.01.2.0 6.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Nias Selatana	Paket	1	6.500.000		Paket	1	6.500.000
1.05.01.2.0 6.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Nias Selatana	Paket	1	150.000.000		Paket	1	150.000.000
1.05.01.2.0 6.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kab. Nias Selatana	Paket	0	-		Paket	0	-
1.05.01.2.0 6.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Nias Selatana	Paket	1	250.000.000		Paket	1	250.000.000
1.05.01.2.0 6.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Nias Selatana	Paket	1	25.000.000		Paket	1	25.000.000
1.05.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Nias Selatana	Lap	150	500.000.000		Lap	150	500.000.000
1.05.01.2.0 7	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Kab. Nias Selatana	Unit	2	75.000.000		Unit	4	150.000.000

1.05.01.2.0 7.02	Pengadaan kendaraan dinas atau operasional lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau yang disediakan	Kab. Nias Selatan	Unit	2	75.000.000		Unit	4	150.000.000
1.05.01.2.0 7.05	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kab. Nias Selatan	Unit	0	-		Unit	0	-
1.05.01.2.0 7.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Nias Selatan	Unit	0	-		Unit	0	-
1.05.01.2.0 8	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai dan Laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Kab. Nias Selatan	Lap	125	2.100.000.000		Lap	125	2.250.000.000
1.05.01.2.0 8.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Nias Selatan	Lap	0	-		Lap	0	-
1.05.01.2.0 8.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Nias Selatan	Lap	125	2.100.000.000		Lap	125	2.250.000.000
1.05.01.2.0 9	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	Kab. Nias Selatan	Unit	12	139.000.000		Unit	12	139.000.000
1.05.01.2.0 9.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Nias Selatan	Unit	3	115.000.000		Unit	3	115.000.000
1.05.01.2.0 9.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Nias Selatan	Unit	8	9.000.000		Unit	8	9.000.000
1.05.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Nias Selatan	Unit	1	15.000.000		Unit	1	15.000.000
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Kab. Nias Selatan	Persen	100			Persen	100	
		Persentase Perda dan Perkada yang disosialisasikan	Kab. Nias Selatan	Persen	20			Persen	20	
1.05.02	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Kab. Nias Selatan	Persen	100	858.721.000		Persen	100	898.721.000
1.05.02.2.0 1	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	Kab. Nias Selatan	Laporan	351	618.721.000		Laporan	351	633.721.000
1.05.02.2.0 1.01	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Kab. Nias Selatan	Kasus	150	215.000.000		Kasus	150	220.000.000
1.05.02.2.0 1.02	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan	Kab. Nias Selatan	Kasus	150	215.000.000		Kasus	150	220.000.000

		penindakan								
1.05.02.2.0 1.03	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Kab. Nias Selatan	Dok	50	90.000.000		Dok	50	95.000.000
1.05.02.2.0 1.04	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Nias Selatan	Dok	0	-		Dok	0	-
1.05.02.2.0 1.05	Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Jumlah SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Nias Selatan	Orang	0	-		Orang	0	-
1.05.02.2.0 1.06	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Kab. Nias Selatan	Dok	0	-		Dok	0	-
1.05.02.2.0 1.07	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	Kab. Nias Selatan	Unit	0	-		Unit	0	-
1.05.02.2.0 1.08	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	Kab. Nias Selatan	Dok	1	98.721.000		Dok	1	98.721.000
1.05.02.2.0 1.09	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan perkara	Jumlah laporan layanan dampak penegakan perda dan perkara yang terlayani	Kab. Nias Selatan	Lap	0	-		Lap	0	-
1.05.02.2.0 2	Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota yang dilaporkan	Kab. Nias Selatan	Laporan	100	190.000.000		Laporan	75	205.000.000
1.05.02.2.0 2.01	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Kab. Nias Selatan	Lap	25	50.000.000		Lap	25	55.000.000
1.05.02.2.0 2.02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Kab. Nias Selatan	Lap	50	90.000.000		Lap	25	95.000.000
1.05.02.2.0 2.03	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota sesuai SOP	Kab. Nias Selatan	Lap	25	50.000.000		Lap	25	55.000.000
1.05.02.2.0 3	Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (ppns) kabupaten/kota	Jumlah Aparatur Satpol-PP yang mengikuti Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (ppns)	Kab. Nias Selatan	Lap	2	50.000.000		Lap	2	60.000.000
1.05.02.2.0 3.01	Pengembangan kapasitas dan karier ppns	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat dalam PPNS	Kab. Nias Selatan	Lap	2	50.000.000		Lap	2	60.000.000

		mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan perda								
1.05.04	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Kab. Nias Selatana	Persen	20	135.000.000		Persen	20	1.890.000.000
1.05.04.2.01	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota yang dilaporkan	Kab. Nias Selatana	Laporan	68	135.000.000		Laporan	69	1.890.000.000
1.05.04.2.01.01	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen NPSM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota setiap tahunnya	Kab. Nias Selatana	Dok	50	90.000.000		Dok	50	95.000.000
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatana	Lap	15	30.000.000		Lap	15	30.000.000
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan/Evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	Kab. Nias Selatana	Dok	0	-		Dok	0	-
1.05.04.2.01.04	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan penanganan kebakaran yang disebabkan B3 dalam daerah kabupaten/kota	Kab. Nias Selatana	Dok	0	-		Dok	0	-
1.05.04.2.01.06	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	Kab. Nias Selatana	Unit	0	-		Unit	1	1.750.000.000
1.05.04.2.01.07	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Kab. Nias Selatana	Orang	3	15.000.000		Orang	3	15.000.000
1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Kab. Nias Selatana	Dok	0	-		Dok	0	-
						4.842.221.000				6.862.221.000

BAB. IV

P E N U T U P

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026.

Renja (Rencana Kerja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan merupakan rencana kerja tahunan yang memuat strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan pendanaan indikatif. Renja Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan.

Harapan kami di Tahun 2025 kondisi sosial, ekonomi, politik dan kebijakan pemerintah, (baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi) tidak berbeda jauh dengan kondisi yang sudah kita proyeksikan dalam penyusunan perencanaan ini, sehingga target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan ini dapat tercapai secara optimal.

TELUK DALAM, MEI 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN NIAS SELATAN,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line followed by a loop and a short vertical stroke, positioned over a faint circular official stamp.

DIONISIUS WAU, SE.,MM
PEMBINA
NIP. 19800724 200804 1 001